

BAB I

PENDAHULUAN

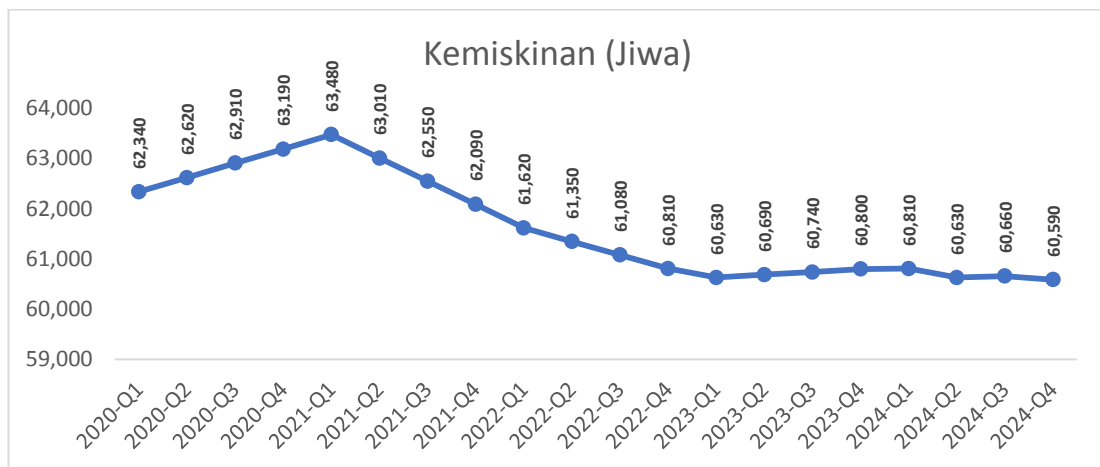
1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan menjadi fenomena tersendiri sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan terjadinya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya antara lain seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, maupun tempat (Laoh *et al.*, 2023). Kemiskinan masih menyebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya terdapat di Provinsi Aceh.

Berdasarkan data BPS (2025), Aceh secara konsisten berada di peringkat atas sebagai provinsi termiskin di Sumatera, bahkan secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih kuat dalam hal pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data terbaru dari BPS Aceh, persentase penduduk miskin mengalami penurunan signifikan dari 14,23% pada Maret 2024 menjadi 12,64 % pada September 2024. Secara geografis, kemiskinan di daerah perdesaan Aceh turun dari 16,75 % (Maret 2024) menjadi 14,99% (September 2024) (penurunan 1,76 poin), sementara di perkotaan turun dari 9,60 % menjadi 8,37 % (penurunan 1,23 poin). Menurut data Desember 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 718,960 jiwa, turun dari 804,530 jiwa pada Maret 2024, seiring turunnya angka kemiskinan secara keseluruhan (BPS, 2023).

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki wilayah cukup luas dan karakteristik geografis yang beragam, mencakup kawasan pesisir, dataran rendah, hingga daerah perbukitan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang sangat bergantung pada kondisi alam namun masyarakat di Aceh Timur masih banyak yang hidup di bawah kemiskinan. Aceh Timur berada di peringkat 14 dari 23 kabupaten/kota, dengan persentase penduduk miskin sekitar 13,26% (Badan Pusat Statistik, 2025).

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di Aceh Timur antara lain keterbatasan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, ketergantungan pada sektor pertanian tradisional yang berisiko tinggi, serta akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur (Badan Pusat Statistik, 2025). Selain itu, meskipun Aceh Timur memiliki potensi sumber daya alam dan sektor pertanian yang cukup besar, pemanfaatannya belum optimal dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Aceh Timur bersifat struktural dan multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasinya (Badan Pusat Statistik, 2025). Berikut perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur:



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025)

Gambar 1.1
Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur (Jiwa) 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur mengalami dinamika yang relatif fluktuatif namun cenderung menurun secara bertahap selama periode 2020–2024. Pada awal tahun 2020 (Triwulan I), tingkat kemiskinan tercatat sebesar 62,34 ribu jiwa, kemudian sedikit meningkat hingga Triwulan IV menjadi 63,19 ribu jiwa. Kenaikan ini mengindikasikan dampak awal pandemi COVID-19 terhadap penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Memasuki tahun 2021, terlihat pola yang lebih bervariasi, yaitu terjadi peningkatan pada Triwulan I sebesar 63,48 ribu jiwa, lalu menurun secara konsisten hingga Triwulan IV menjadi 62,09 ribu jiwa. Penurunan ini dapat diartikan sebagai hasil dari pemulihan ekonomi dan berbagai program bantuan sosial pemerintah seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai terealisasi lebih merata pada tahun tersebut. Pada tahun 2022, tren penurunan lebih jelas terlihat, di mana jumlah penduduk miskin menurun dari 61,62 ribu jiwa

pada Triwulan I menjadi 60,81 ribu jiwa pada Triwulan IV. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta efektivitas program intervensi pemerintah daerah maupun pusat.

Selanjutnya pada Tahun 2023 memperlihatkan kondisi yang relatif stabil. Jumlah penduduk miskin bergerak di kisaran 60,63 ribu jiwa pada Triwulan I hingga 60,80 ribu jiwa pada Triwulan IV. Stabilitas ini menunjukkan bahwa setelah fase pemulihan pandemi, Kabupaten Aceh Timur berada dalam situasi keseimbangan baru, di mana daya beli masyarakat mulai terjaga dan kemiskinan tidak lagi meningkat secara signifikan.

Pada tahun 2024, meskipun fluktuasi kecil masih terjadi (antara 60,59–60,81 ribu jiwa), tren umum memperlihatkan arah yang cenderung menurun dibandingkan awal periode. Hal ini mencerminkan dampak berkelanjutan program bantuan sosial serta penguatan sektor ekonomi lokal, yang mampu menahan laju kenaikan kemiskinan.

Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Meskipun penurunannya tergolong lambat, tren ini menunjukkan arah yang positif. Namun demikian, angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan bahwa tantangan struktural seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, dan ketergantungan pada sektor ekonomi informal masih perlu mendapat perhatian serius agar penurunan kemiskinan dapat lebih signifikan dan merata (Zidan Izani & Taufiq, 2022).

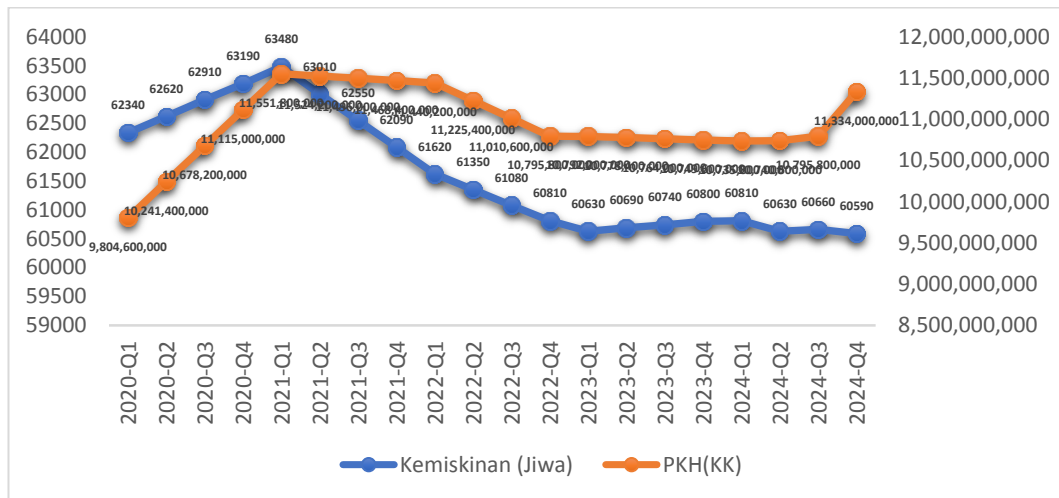
Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2020 hingga 2024 tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai program bantuan sosial (bansos) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selama periode tersebut, terutama setelah lonjakan kemiskinan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021, pemerintah menggencarkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta bantuan subsidi upah dan sembako untuk masyarakat berpenghasilan rendah, (Badan Pusat Statistik, 2025).

Berdasarkan laporan dari Kompas dan Tempo, ditemukan bahwa berbagai bantuan sosial masih banyak yang tumpang tindih, salah sasaran, dan tidak tepat waktu. Data pemerintah pusat dan daerah belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga terjadi pengulangan penyaluran bantuan kepada penerima yang sama. Misalnya, Kompas (2024) mencatat bahwa dalam rapat koordinasi pada Desember 2024, Wakil Ketua BP Taskin, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa “data kemiskinan yang selama ini dijadikan rujukan penyaluran bantuan pemerintah berbeda-beda” dan menyebabkan penumpukan penerima bansos.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan juga terus menerus diluncurkan oleh pemerintah dengan model-model bantuan ataupun program-program kemiskinan yang secara entitas langsung bersentuhan kepada masyarakat. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang pertama kali muncul pada tahun 2007 (Alfath *et al.*, 2025). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Bab 1 ketentuan umum pasal 1 menyatakan Program Keluarga Harapan adalah

program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Berdasarkan pendapat tersebut, menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin dan dapat menanggulangi kemiskinan (Beni *et al.*, 2023).

Sasaran Program Keluarga Harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia 0-6 tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari umur 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (Kementerian Keuangan, 2025). Berikut perkembangan jumlah penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Timur:



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025)

Gambar 1.2 Kemiskinan dan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Timur 2020-2024

Gambar 1.2 di atas memperlihatkan perkembangan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Timur beserta nilai dana yang disalurkan dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan data triwulanan. Secara umum, jumlah penerima PKH cenderung menurun secara bertahap setelah periode puncak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, jumlah penerima PKH tercatat sekitar 62.340 jiwa pada Triwulan I dan meningkat hingga 63.190 jiwa pada Triwulan IV, sejalan dengan peningkatan total dana bantuan dari Rp9,80 miliar menjadi Rp11,11 miliar. Tren ini menggambarkan respons pemerintah dalam memperluas cakupan bantuan sosial pada masa krisis.

Memasuki tahun 2021, jumlah penerima sempat mencapai 63.480 jiwa pada Triwulan I dengan nilai dana Rp11,55 miliar, namun kemudian menurun bertahap hingga 62.090 jiwa pada Triwulan IV dengan nilai dana Rp11,46 miliar. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan verifikasi data penerima

bantuan dan adanya rumah tangga yang keluar dari kategori penerima akibat pemulihan ekonomi pascapandemi.

Tren penurunan berlanjut sepanjang tahun 2022. Pada Triwulan I tercatat 61.620 penerima dengan dana Rp.11,44 miliar, turun menjadi 60.810 penerima pada Triwulan IV dengan dana Rp.10,79 miliar. Tahun 2023 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan jumlah penerima berkisar 60.630–60.800 jiwa dan nilai dana bantuan sekitar Rp.10,74–10,79 miliar per triwulan, mencerminkan stabilisasi jumlah penerima bantuan sosial pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan periode awal pandemi.

Pada tahun 2024, jumlah penerima PKH berkisar antara 60.590–60.810 jiwa per triwulan. Nilai dana bantuan juga menunjukkan fluktuasi kecil, mulai dari Rp.10,73 miliar pada Triwulan I hingga Rp.11,33 miliar pada Triwulan IV. Stabilitas ini dapat dimaknai sebagai keberhasilan program dalam menjaga keberlanjutan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem sekaligus menunjukkan upaya pemerintah melakukan perbaikan basis data penerima secara berkala.

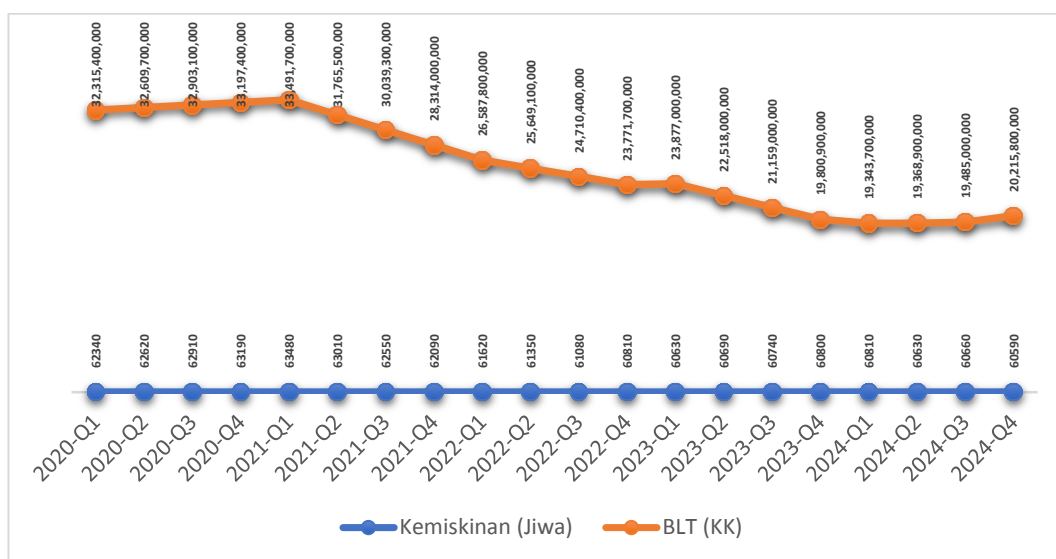
Penelitian yang dilakukan oleh Fadhli & Nazila (2023) menemukan bahwa PKH memiliki pengaruh positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, Salsabila *et al.* (2024) menyatakan bahwa PKH dinilai sebagai salah satu program yang efektif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan serupa juga disampaikan oleh Asnawi *et al.* (2020), yang menunjukkan bahwa bantuan PKH memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial lainnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menjadi salah satu program bantuan pemerintah yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan pada tahun 2005, merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pengaruh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka membantu masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat miskin sebagai akibat dari dicabutnya subsidi bahan bakar minyak pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengakibatkan minyak dikembalikan ke harga pasar, sehingga untuk meningkatkan daya beli konsumen oleh pemerintah memberikan subsidi langsung kepada masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk rakyat miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM, dana ini dikeluarkan secara bertahap oleh pemerintah kepada masyarakat miskin (Huda, 2025).

Implementasi kebijakan penyaluran dana BLT sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM telah menimbulkan konflik dalam masyarakat, karena keakuratan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai masih kurang tepat. Terjadinya rasa iri dan rasa curiga diantara warga karena lemahnya proses seleksi terhadap penerima BLT. Pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin (Badan Pusat Statistik, 2025).

Penyaluran dana BLT didasarkan kepada data-data masyarakat miskin yang disampaikan oleh BPS kepada Departemen Sosial (Depsos), kemudian

Depsos menyampaikan data-data tersebut kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk selanjutnya diverifikasi oleh Gubernur beserta perangkat-perangkatnya, setelah selesai maka selanjutnya dibuat kartu dalam bentuk kupon yang diberikan kepada masyarakat penerima untuk dipergunakan dalam mengambil BLT pada setiap priodenya. Setiap bulannya masyarakat penerima kompensasi diberikan subsidi Rp.100.000,- yang dibayar selama tiga bulan, dalam setahun 4 tahap masing-masing tahap diberikan Rp.300.000,- (untuk tiga bulan) setahun Rp.1.200.000,-, dibagi dalam 4 tahap (Fadhli & Nazila, 2023). Berikut perkembangan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Aceh Timur:



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025)

Gambar 1.3 Kemiskinan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Aceh Timur 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1.3 data Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan tren penurunan jumlah penerima dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah penerima BLT relatif tinggi yaitu

62.340 penerima pada Triwulan I dengan dana sebesar Rp.32.315.400.000, meningkat menjadi 62.620 penerima dengan Rp.32.609.700.000 pada Triwulan II, 62.910 penerima dengan Rp.32.903.100.000 pada Triwulan III, hingga mencapai 63.190 penerima dengan Rp.33.197.400.000 pada Triwulan IV. Lonjakan ini mencerminkan respons cepat pemerintah dalam memperluas bantuan tunai guna menjaga daya beli masyarakat miskin selama masa krisis.

Memasuki tahun 2021, BLT sempat mencapai puncak pada Triwulan I dengan 63.480 penerima dan dana Rp.33.491.700.000, namun kemudian menurun bertahap menjadi 63.010 penerima dengan Rp.31.765.500.000 pada Triwulan II, 62.550 penerima dengan Rp.30.039.300.000 pada Triwulan III, dan 62.090 penerima dengan Rp.28.314.000.000 pada Triwulan IV. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan basis data penerima bantuan dan berkurangnya jumlah rumah tangga yang membutuhkan BLT seiring pemulihan ekonomi pascapandemi.

Pada tahun 2022 tren penurunan semakin jelas. Jumlah penerima berkurang dari 61.620 penerima dengan Rp.26.587.800.000 pada Triwulan I, menjadi 61.350 penerima dengan Rp.25.649.100.000 pada Triwulan II, 61.080 penerima dengan Rp.24.710.400.000 pada Triwulan III, hingga 60.810 penerima dengan Rp.23.771.700.000 pada Triwulan IV. Penurunan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran serta penguatan ekonomi rumah tangga miskin.

Tahun 2023 memperlihatkan penurunan lebih lanjut. Jumlah penerima BLT bergerak dari 60.630 penerima dengan Rp.23.877.000.000 pada Triwulan I,

60.690 penerima dengan Rp.22.518.000.000 pada Triwulan II, 60.740 penerima dengan Rp.21.159.000.000 pada Triwulan III, hingga 60.800 penerima dengan Rp.19.800.900.000 pada Triwulan IV. Penurunan yang konsisten ini mengindikasikan BLT telah mengalami transisi dari program darurat pandemi menjadi program perlindungan sosial yang lebih terarah.

Pada tahun 2024, jumlah penerima BLT relatif stabil di kisaran 60.590–60.810 jiwa per triwulan. Dana bantuan juga bergerak pada kisaran Rp.19.343.700.000 pada Triwulan I, Rp.19.368.900.000 pada Triwulan II, Rp.19.485.000.000 pada Triwulan III, dan Rp.20.215.800.000 pada Triwulan IV.

Menurut hasil penelitian Salsabila *et al.* (2024), menyatakan BLT kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang konsumtif dan tidak memberikan stimulus bagi penerima untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri.

Menurut Risqiana, (2020) mengatakan bahwa secara umum akibat yang akan timbul dari permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan kelompok miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarginalkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup. Presiden Joko Widodo pada April 2016 memberikan arahan kepada jajaran menterinya tentang pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif, penyaluran semua Bantuan Sosial (bansos) dan

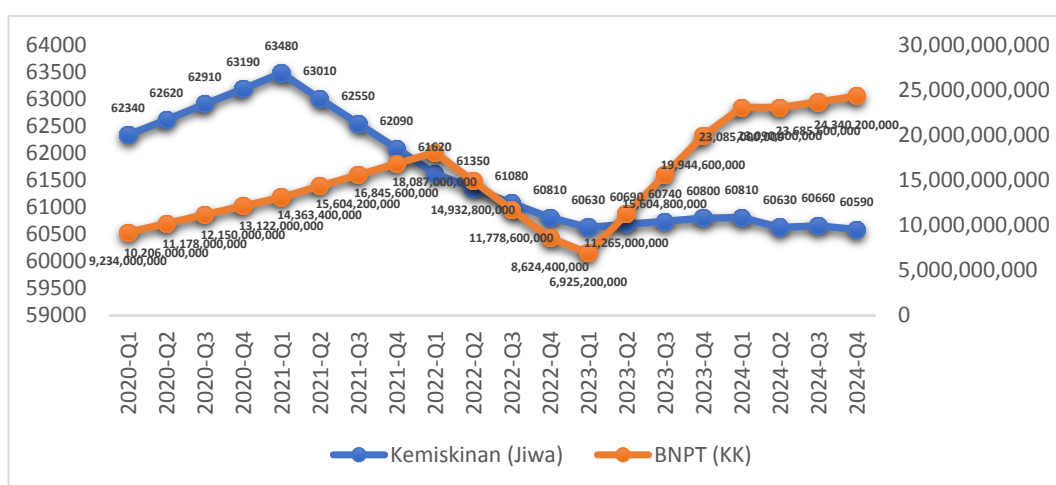
subsidi secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pengawasan serta mengurangi penyimpangan dan perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) menjadi satu (1) kartu.

Selain PKH dan BLT, adapun salah satu upaya pemerintah Indonesia guna untuk menanggulangi kemiskinan juga melalui program Jaminan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan reformasi dari program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusif keuangan Negara. Dalam waktu lima tahun terakhir jumlah penerimaan Bantuan Sosial (bansos) terus meningkat seiring dengan peningkatan anggaran. Tujuan dari penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai agar penyaluran memenuhi 6T yaitu: tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk mewujudkan 6T Kementerian Sosial melakukan transformasi bantuan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelumnya menerima beras sekarang beralih ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menerima uang untuk dibelanjakan bahan pangan seperti: beras, telur, sayur-sayuran, buah-buahan dan bahan pokok lainnya (Dewi & Andrianus, 2021).

Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan

bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan sembako. Dalam penyalurannya, penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didalamnya terdapat saldo sebesar Rp 200.000,- yang diberikan setiap bulan. Apabila nilai bantuan tidak digunakan untuk membeli bahan pokok makanan maka saldo akan masih tersimpan di kartu ATM di masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Kemensos.go.id, 2025).

Kabupaten Aceh Timur menjadi salah satu Kabupaten/Kota yang menyalurkan bantuan pangang Non Tunai (BPNT), Program bantuan pangang Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2020. Bantuan pangang Non Tunai (BPNT) Kabupaten Aceh Timur ini disalurkan melalui elektronik yaitu melalui kartu keluarga Sejahtera (KKS). Berikut perkembangan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Aceh Timur:



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025)

Gambar 1.4 Kemiskinan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Aceh Timur 2020-2024

Berdasarkan data triwulanan tahun 2020–2024, terlihat hubungan yang erat antara dinamika penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Timur. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin cenderung menurun secara perlahan dari kisaran 63 ribu jiwa pada 2020–2021 menjadi sekitar 60 ribu jiwa pada 2023-2024, sementara dana BPNT mengalami peningkatan signifikan terutama setelah tahun 2023. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin tercatat antara 62.340–63.190 jiwa dengan dana BPNT yang meningkat dari Rp.9.234.000.000 pada Triwulan I menjadi Rp.12.150.000.000 pada Triwulan IV. Kenaikan ini mencerminkan respon pemerintah terhadap meningkatnya kerentanan pangan pada awal pandemi COVID-19.

Tahun 2021 memperlihatkan angka penduduk miskin yang relatif stabil di kisaran 62 ribu jiwa, sedangkan dana BPNT naik dari Rp.13.122.000.000 pada Triwulan I hingga Rp.16.845.600.000 pada Triwulan IV. Peningkatan dana ini menunjukkan adanya perluasan cakupan bantuan pangan untuk menjaga daya beli dan mengurangi tekanan kemiskinan. Memasuki tahun 2022, jumlah penduduk miskin turun ke kisaran 61 ribu jiwa, tetapi dana BPNT justru berfluktuasi: naik menjadi Rp.18.087.000.000 pada Triwulan I lalu turun tajam ke Rp.8.624.400.000 pada Triwulan IV. Penurunan dana di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi dapat menunjukkan adanya penyesuaian anggaran dan perbaikan data penerima yang lebih tepat sasaran.

Tahun 2023 jumlah penduduk miskin terus menurun hingga 60.630 jiwa, tetapi dana BPNT melonjak tajam dari Rp.6.925.200.000 pada Triwulan I menjadi

Rp.19.944.600.000 pada Triwulan IV. Lonjakan ini dapat dibaca sebagai penguatan kembali program BPNT di tengah upaya pemerintah mempertahankan tren penurunan kemiskinan.

Pada tahun 2024, meskipun jumlah penduduk miskin relatif stabil pada 60.590–60.810 jiwa, dana BPNT mencapai level tertinggi sepanjang periode: Rp.23.085.000.000 pada Triwulan I hingga Rp.24.340.200.000 pada Triwulan IV. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan dana BPNT tidak hanya sekadar respons terhadap jumlah penduduk miskin, tetapi juga strategi pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial sehingga kemiskinan tetap terkendali.

Fadhli & Nazila (2023) menemukan bahwa BPNT memiliki pengaruh negatif terhadap penanggulangan kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun BPNT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan, pelaksanaannya kemungkinan belum optimal atau tidak tepat sasaran. Padahal, bantuan sosial seperti BPNT seharusnya dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin, meningkatkan daya beli, serta mendorong ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, efektivitas program ini perlu dievaluasi agar bantuan dapat benar-benar mencapai dan memberdayakan kelompok masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat peran bansos sebagai instrumen penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Pengaruh Dana Bantuan Sosial (Bansos) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur ?
2. Bagaimana pengaruh bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimana pengaruh bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur?
4. Bagaimana pengaruh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Mengetahui pengaruh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.
2. Mengetahui pengaruh bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.
3. Mengetahui pengaruh bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.

4. Mengetahui pengaruh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat kegunaan secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang membaca:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi peneliti serta pembaca mengenai pengaruh bantuan sosial Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur.
2. Penelitian ini diharapkan juga akan memperkaya literatur ilmiah dan memperdalam teori bagi peneliti dan pembaca, tetapi juga bermanfaat sebagai saran serta masukan yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya terhadap penelitian selanjutnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pemerintah di Kabupaten Aceh Timur, diharapkan pemerintah daerah dapat menekan angka kemiskinan.

2. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi semua pihak yang akan melakukan analisis mengenai pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan di kabupaten Aceh timur.